BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan diterapkan Peraturan Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategi yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan.

Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Nunuy Nur Afiah (2010 : 21) adalah

> "Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan".

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010 : 137) adalah:

> "Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan

yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas lapooran keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.1.2 Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nunuy Nur Afiah (2010:27) Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai 3 hal yaitu:

- Pengakuan
- Pengukuran
- Pengungkapan

Adapun penjelasan kebijakan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- Pengakuan
  Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,kewajiban,ekuitas dana,pendapatan belanja, dan pembiayaan sehingga akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- Pengukuran
  Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos kedalam laporan keuangan.
- Pengungkapan
  untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang dicapainya adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Standar akuntansi pemerintah mengatur mengenai 3 hal yaitu:

- Pengakuan
- Pengukuran
- Pengungkapan

Adapun penjelasan kebijakan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- Pengakuan
  Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,kewajiban,ekuitas dana,pendapatan belanja, dan pembiayaan sehingga akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- Pengukuran
  Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos kedalam laporan keuangan.
- Pengungkapan
  untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang dicapainya adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan.

Dengan demikian SAP, diharapkan akan adanya transparasi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)* sehingga diperlukan langkah-langkah yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan. (Irvan Permana, 2011)

2.1.2 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Adapun pengertian dari kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah:

"Kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan".

Pengertian aparatur pemerintah menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 169) adalah:

"Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku".

Pengertian aparatur pemerintah daerah menurut Koswara (2001 : 259) adalah

"Seluruh perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah".

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah pada unit organisasi pemerintah daerah mulai dari pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kabupaten.

2.1.2.2 Ukuran Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Setiap satuan kerja pemerintah daerah harus memiliki aparatur yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Sedangkan menurut Sofyandi (2013:113) ukuran kualitas aparatur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
   Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pelatihan
   Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan/stimulasi kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi.

Menurut Racmawati (2008:117) ukuran kualitas aparatur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal
   Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan dan pelatihan
   Program pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral dalam pengembangan pegawai. Pelatihan dalam bentuk yang kompleks diberikan untuk membantu pegawai mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka di mana akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai sasaran.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah

"Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan."

Definisi laporan keuangan menurut Deddi Nordiawan (2012:151) adalah:

"Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas."

Definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Tanjung (2012 : 12) adalah:

> "Laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan berbagai informasi laporan keuangan."

Sedangkan definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

> "Suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, restribusi atau transaksi lainnya.

2.1.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) mengemukakan bahwa:

> "Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan
2) Andal
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, danmemprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:
   - Memiliki manfaat umpan balik*(feedback value).*
     Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   - Memiliki manfaat prediktif*(predictive value).*
     Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akandatang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   - Tepat waktu.
     Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   - Lengkap.
     Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2) Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

   a) Penyajian jujur.
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b) Dapat diverifikasi *(verifiability).*
      Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3) Dapat dibandingkan.
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sedangkan menurut Tanjung (2012:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

> "Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, danmemprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

- Memiliki manfaat umpan balik*(feedback value).*
  Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif*(predictive value).*
  Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akandatang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu.
  Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap.
  Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

   - Penyajian jujur.
     Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   - Dapat diverifikasi *(verifiability).*
     Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   - Netralitas.
     Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3. Dapat dibandingkan.
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada

kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Indra Bastian (2010:336) Laporan keuangan Pemerintah, disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo, 2013).

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD dibidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. (Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo, 2013).

Berdasarkan teori-teori yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan satu sama lain.

2.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

Selain itu menurut Indra Bastian (2010 : 138) terdapat hubungan terkait antara standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

Menurut Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan".

Menurut Mahmud Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan".

Menurut Rukmi Juwita (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$)".

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Jones dan Pendlebury (2010) yang diterjemahkan oleh Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2015 : 1) Pemerintah Daerah adalah

> "Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan".

Menurut Mahmud Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa standar kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

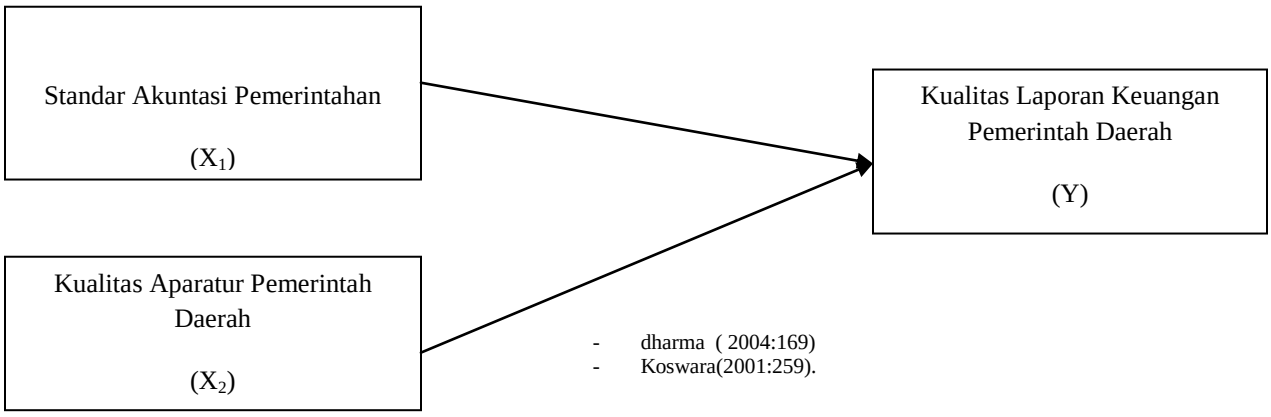
> “kualitas aparatur pemerintah daerah atau PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah”.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah daerah merupakan perangkat penting dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian aparatur pemerintah daerah merupakan persyaratan penting dalam menyajikan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.2.3 PARADIGMA PENELITIAN

- Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014
- Wayan Kusuma Wiraputra ,Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati, 2014
- Rukmi Juwita, 2013 ISSN 1411-514X

- M. Yusuf John dan Dwi Setiawan S. (2009 : 95)
- Indra Bastian (2010 : 137)
- Mahmudi (2011 : 271)



- dharma (2004:169)
- Koswara(2001:259).

- Silviana, 2012 ISSN 2252-3936
- Wiwik Andriani, 2010 ISSN 1858-3687
- Dyah Setyaningrum, Febriyani Syafitri, 2012
- Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo, 2013 ISSN : 2252-7826

- Erlina Rasdianto. (2013 : 21)
- Tanjung (2012 : 12)
- Nunuy Nur Afiah (2010 : 14, 162)

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wayan Kusuma Wiraputra , Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati, 2014	PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)	Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP memiliki nilai thitung sebesar 3,548 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. Karena thitung lebih besar dari ttabel yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian berarti menunjukkan berpengaruh positif signifikan. maka hasil penelitian berarti berpengaruh positif signifikan.
3.	Rukmi Juwita, 2013 ISSN 1411-514X	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Dugaan sementara bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. Ho.$\beta 1 = 0$ Standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.
4.	Silviana, 2012 ISSN- 2252-3936	Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas	Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (x)

		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat	menunjukkan nilai positif yaitu sebesar **0,164**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah (*x*) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD (*y*), artinya semakin tinggi tingkat komitmen kepala daerah (*x*) akan menyebabkan semakin tinggi kualitas LKPD (*y*).
5.	Dyah Setyaningrum Febriyani Syafitri, 2012	ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN	Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 9 (sembilan) variabel yang diuji, hanya 4 (empat) variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan *intergovernmental revenue*. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.

6.	Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo, 2013 ISSN : 2252-7826	PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TUAL)	Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
7.	Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh, 2008	PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	Korelasi antara variabel penerapan SAP (X1) dengan variabel peningkatan kualitas laporan keuangan (Y) adalah 0.164. Korelasi antara penerapan Sap dan kualitas laporan keuangan sangat lemah, jauh lebih kecil dari 0.5. Koefisien determinasi sebesar 0.027, artinya hanya 2.7% variasi yang terjadi pada peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan 97.3% ditentukan oleh faktor lainnya. Angka ini menunjukkan rendahnya peran penerapan SAP dalam peningkatan kualitas laporan

			keuangan.
8.	Vicky Agustiawan Lasoma, 2012	PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gorontalo Utara dengan arah postif. Hasil ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini kurang dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan, dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif.
9.	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014	PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI	Pertama, Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi

		TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)	pemerintahan, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Ketiga, Kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng.
10.	Wiwik Andriani, 2010 ISSN 1858-3687	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan).	Penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung.

2.4 Hipotesis.

Menurut Sekaran (2011 : 135) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara satu atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bisa diuji. Berikut ini adalah hipotesis yang penulis akan uji:

H_1: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.

H_2: kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.

.